

Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan yang Terdaftar Pada Jakarta Islamic Indeks 70 (JII 70)

Mega Rahmi^{1✉}, Yosep Eka Putra², Betris Trisnawati³

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia

Abstrak

Banyaknya kasus penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia, bahkan perusahaan yang terdaftar kedalam kategori saham syariah. Untuk itu perlu adanya upaya untuk mengendalikan tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh badan usaha atau perusahaan. Salah satu upaya untuk menekan *tax avoidance* yang dilakukan oleh eksekutif perusahaan adalah dengan meningkatkan pengawasan atau *corporate governance*. Peneliti ingin membuktikan secara empiris pengaruh kepemilikan manajerial dan *corporate governance* terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif menggunakan data panel yang bersumber dari data laporan keuangan perusahaan yang terdaftar pada JII 70. Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, dengan beberapa kriteria yang telah ditentukan sehingga didapatkan 17 perusahaan yang memenuhi kriteria. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik dan analisis regresi linier berganda menggunakan SPSS 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *managerial ownership* (MO) berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan *Good corporate governance* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci: *Managerial Ownership, Corporate Governance,, Tax Avoidance.*

Abstract

There are many cases of tax avoidance by companies in Indonesia, even companies listed in the sharia stock category. Therefore, efforts are needed to control tax avoidance by business entities or companies. One of the efforts to reduce tax avoidance by company executives is to improve supervision or corporate governance. The researcher wants to prove empirically the influence of managerial ownership and corporate governance on tax avoidance. This research is descriptive research with a quantitative approach using panel data sourced from the financial reports of companies listed on the JII 70. The sampling method used is purposive sampling, with several predetermined criteria so that 17 companies that meet the criteria are obtained. The data analysis techniques used were statistical analysis and multiple linear regression analysis using SPSS 22. The results showed that the managerial ownership (MO) variable had a positive effect on tax avoidance. Meanwhile, good corporate governance had a negative effect on tax avoidance.

Keywords: *Managerial Ownership, Corporate Governance,, Tax Avoidance*

Copyright (c) 2025 Mega Rahmi

✉ Corresponding author :

Email Address : megarahmi@uinmybatusangkar.ac.id

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan sebagai wajib pajak dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, bersifat memaksa dan pemungutannya dilakukan berdasarkan undang-undang. Pajak merupakan sumber pendanaan bagi negara, sedangkan bagi perusahaan adalah beban yang akan mengurangi laba bersih. Perbedaan kepentingan dari fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan kontinyu tentu bertolak belakang dengan kepentingan dari perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Beban pajak

yang besar menyebabkan perusahaan akan berusaha untuk melakukan penghindaran pajak dengan resiko yang kecil. (Nugraha & Octisari, p. 2022)

TINJAUAN PUSTAKA

Agency Theory (Teori Keagenan)

Teori agensi merupakan hubungan kontraktual antara dua atau lebih orang (pihak), dimana salah satu pihak disebut pemilik perusahaan (*principal*) dan pihak yang lain disebut (*agen*). Teori keagenan adalah pemberian wewenang oleh pemilik perusahaan kepada pihak manajemen perusahaan untuk menjalankan operasional perusahaan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati, jika kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama untuk meningkatkan nilai perusahaan maka manajemen akan bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan. (Sudarno, Renaldo, & Dkk, 2018)

Teori keagenan merupakan bagian dari teori permainan yang mempelajari desain kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan agen dan principal, Ketika kepentingan agen bertentangan dengan kepentingan principal. Adanya perbedaan kepentingan antara manajer dan investor menyebabkan timbulnya asimetri informasi. Asimetri informasi inilah yang akan mendorong manajer untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui oleh pemegang saham.

Tujuan manajer menyembunyikan beberapa informasi dari pemegang saham adalah untuk mengubah informasi agar terlihat baik dimata investor. Manajer yang lebih mengetahui tentang keadaan perusahaan, tentunya memiliki informasi perusahaan secara keseluruhan dibandingkan dengan pemegang saham. Beberapa hal yang dapat dilakukan manajer adalah manajemen laba dan *tax avoidance*.

Manajer dapat menaikkan laba perusahaan dan melakukan penghindaran pajak agar laba perusahaan terlihat tinggi pada periode tersebut. Tingginya laba yang didapat akan menarik minat investor untuk melakukan investasi pada perusahaan tersebut, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan di mata investor. (Violeta & Serly, 2020)

Teori Asimetri Informasi

Konflik kepentingan antara manajerial (*agen*) dan *stakeholder (principal)* menyebabkan adanya masalah keagenan, manajemen tidak selalu bertindak untuk kepentingan stakeholder, tetapi terkadang untuk kepentingan manajemen itu sendiri tanpa memperhatikan dampak yang diakibatkan kepada stakeholder. Ketidakseimbangan informasi (*information asymmetry*) dapat juga menyebabkan adanya masalah keagenan, karena perbedaan informasi dari pihak manajemen (*agen*) dan *stakeholder (principal)* sehingga manajemen bisa manipulasi informasi laporan keuangan tanpa diketahui *stakeholder* kebenarannya. Salah satu konflik keagenan adalah asimetri informasi. Agen memiliki informasi lebih banyak dibandingkan dengan *principal* sehingga menimbulkan adanya asimetri informasi yaitu suatu kondisi dimana adanya ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak manajemen sebagai penyedia informasi dengan pihak pemegang saham atau stakeholder sebagai pengguna informasi. (Sudarno, Renaldo, & Dkk, 2018)

Masalah keagenan dapat dipicu oleh kondisi adanya kesenjangan informasi antara principal dan agen, atau diistilahkan dengan asimetri informasi atau ketidakseimbangan informasi, yang dalam hal ini ialah pengungkapan laporan keuangan, dimana laporan keuangan ini nantinya akan digunakan oleh berbagai pihak internal perusahaan (manajemen perusahaan) dan pihak eksternal perusahaan (investor). Laporan keuangan ini lebih penting bagi pihak eksternal dibandingkan pihak internal karena pihak eksternal memiliki pengaruh yang lebih daripada pihak internal. Asimetri informasi ini menimbulkan terjadinya konflik antara pihak manajer dengan pihak pemegang saham yang dimana saling mencoba memanfaatkan masing-masing pihak untuk kepentingannya sendiri. (Pratama, Tantangan Tata Kelola BUMN, Halaman 107, 2022)

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) merupakan tindakan legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan. Menurut (Nurmawan & Nuritomo, 2022) *tax avoidance* merupakan salah satu cara untuk menghindari pajak dengan tidak melanggar peraturan perpajakan.

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) oleh perusahaan mencakup perencanaan pajak legal dan penghindaran pajak illegal. Perencanaan pajak berarti mengurangi beban pajak perusahaan melalui investasi dan penataan aktivitas bisnis dalam ruang lingkup undang-undang perpajakan. *Tax Avoidance* yang melampaui batas yang diperbolehkan oleh undang-undang, akan sampai pada titik menghindari kewajiban perpajakan melalui pelanggaran undang-undang perpajakan dan peraturan terkait. (Putra & Aziz, 2020)

Tax avoidance (penghindaran pajak) secara hukum tidak dilarang meskipun sering menjadi sorotan yang kurang menarik dari kantor pajak karena menganggap memiliki konotasi yang negatif. Tindakan *tax avoidance* diperbolehkan karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur. Akan tetapi, dari sudut pandang etika bisnis, *Tax avoidance* (penghindaran pajak) tidak sesuai dengan etika karena *Tax avoidance* (penghindaran pajak) dilakukan melalui skema dan cara tertentu, sehingga keuntungan yang diperoleh tercatat lebih kecil dari yang sebenarnya agar utang pajak yang tercatat dalam jumlah minimal tetapi masih dalam bingkai perpajakan.

Tax avoidance merupakan salah satu skema transaksi yang ditunjukkan untuk meminimalisir beban pajak dengan memanfaatkan berbagai aspek kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang ada dalam ketentuan perpajakan suatu negara. (Puspita & Febrianti, 2017).

Dari penjelasan mengenai *tax avoidance* diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak yang dilakukan dengan cara masih tetap dalam bingkai ketentuan perpajakan. Metode dan Teknik dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Menurut (Moeljono, 2020) terdapat beberapa faktor yang memotivasi wajib pajak untuk melakukan penghematan pajak dengan ilegal: Jumlah pajak yang harus dibayar. Semakin besar jumlah pajak yang harus dibayarkan, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.

Tax avoidance ini merupakan segala sesuatu yang dilakukan perusahaan yang berakibat pada pengurangan terhadap pajak perusahaan (Syukrina, 2019). Motif perusahaan pada praktek ini yaitu upaya memperbesar keuntungan yang diharapkan oleh pemegang saham, dan pelaksanaannya dilakukan oleh manajer. Praktek penghindaran pajak membuka peluang bagi manajer untuk bersikap oportunistik untuk tujuan keuntungan jangka pendek yang memungkinkan besar akan merugikan pemegang saham dalam jangka panjang. Oleh sebab itu perlu adanya upaya untuk mengendalikan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) ini. Karena kegiatan operasional perusahaan dijalankan oleh manajer perusahaan, maka diperlukan adanya kegiatan pengawasan dalam mengawasi tindakan ini.

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) diukur dengan cara menghitung *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$CETR = \frac{\text{Beban Pajak Kini}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Good Corporate Governance (GCG)

Good Corporate Governance (GCG) merupakan sistem, proses dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan terutama dalam arti sempit, hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi demi tercapainya tujuan organisasi. *Corporate Governance* dimaksudkan untuk mengatur

hubungan tersebut dan mencegah terjadinya kesalahan yang signifikan dalam strategi korporasi serta untuk memastikan bahwa kesalahan yang terjadi dapat segera diperbaiki. (Wirianata, 2019)

Good Corporate Governance merupakan tata kelola yang baik pada suatu usaha yang dilandasi oleh etika profesional dalam berusaha. Pemahaman GCG merupakan wujud penerimaan akan pentingnya suatu perangkat peraturan atau tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis. Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Dengan demikian perusahaan diharapkan akan cenderung mengambil tindakan perpajakan yang tidak beresiko dengan tidak melakukan *tax avoidance*. (Muchtar, Hidayat, & Astreanah, 2021).

Corporate Governance muncul sejalan dengan *agency theory* yaitu karena adanya pemisahan antara kepemilikan dengan pengendalian perusahaan. Permasalahan keagenan dalam hubungannya antara pemilik modal dengan manajer adalah bagaimana sulitnya pemilik dalam memastikan bahwa dana yang ditanamkan tidak diambil alih atau diinvestasikan pada proyek yang tidak menguntungkan sehingga mendatangkan return. Oleh sebab itu perlu adanya mekanisme control yang dapat menyelaraskan kepentingan kedua belah pihak yaitu *corporate governance*.

Menurut (Prihantono & Fachrurazi, 2019) menyatakan bahwa tujuan utama dari *good corporate governance* adalah memberikan acuan yang memungkinkan pengawasan berjalan efektif sehingga tercipta mekanisme pengendalian dan keseimbangan (*check and balance*) untuk mencegah penyalagunaan dari sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan.

Penilaian dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang dilakukan oleh responden dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan, baik internal maupun eksternal mengikuti ketentuan IICG. Aspek yang dinilai meliputi komitmen terhadap tata kelola perusahaan, hak pemegang saham dan fungsi kepemilikan kunci, perlakuan setara terhadap seluruh pemegang saham, peran *stakeholders* dalam tata kelola perusahaan, pengungkapan dan transparansi, serta tanggung jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.

Hasil program riset dan pemeringkatan CGPI adalah penilaian dan pemeringkatan penerapan GCG pada perusahaan peserta dengan memberikan skor dan pembobotan nilai berdasarkan acuan yang telah dibuat. Pemeringkatan CGPI didesain menjadi tiga kategori berdasarkan tingkat/level terpercaya yang dapat dijelaskan menurut skor penerapan GCG seperti pada Tabel berikut:

Tabel 1. Kategori Pemeringkatan CGPI

Skor	Level
85-100	Sangat terpercaya
70-84	Terpercaya
55-69	Cukup terpercaya

Esensi *corporate governance* adalah pemeringkatan kinerja perusahaan melalui *supersive* atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya berdasar kerangka aturan dan peraturan yang berlaku (Suharna & Swandari, 2018).

Kepemilikan Manajerial (*Managerial Ownership*)

Kepemilikan manajerial merupakan salah satu aspek *corporate governance* yang dapat mengurangi *agency cost* apabila porsi dalam struktur kepemilikan di perusahaan ditingkatkan. Pemberian kesempatan manajer untuk terlibat dalam kepemilikan saham bertujuan untuk menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemegang saham. Keterlibatan manajer tersebut mendorong manajer untuk bertindak secara hati-hati karena mereka akan turut menanggung konsekuensi atas keputusan yang diambilnya. Selain itu, manajer akan

termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengelola perusahaan (Prastiyanti & Mahardika, 2022)

Kepemilikan manajerial adalah proporsi saham biasa yang dimiliki oleh manajemen yang diukur dari jumlah persentase saham biasa yang dimiliki oleh manajemen secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan. (Prasetyo & Pramuka, 2018) menegaskan bahwa struktur kepemilikan saham manajerial diukur sebagai persentase saham biasa atau opsi saham yang memiliki direktur dan karyawan. Semakin besar proporsi kepemilikan saham manajerial pada perusahaan, maka manajemen cenderung akan lebih giat untuk kepentingan pemegang saham karena apabila terdapat keputusan yang salah, manajemen juga yang akan menanggung konsekuensinya. *Agency theory* menyatakan bahwa manajer dalam pengelolaan perusahaan mempunyai tanggung jawab yang besar. Manajer harus mengoptimalkan profit perusahaan, yang nantinya akan dilaporkan kepada pemilik perusahaan. Dengan adanya tanggung jawab yang besar, tentu manajer menginginkan imbalan yang besar juga. Dengan demikian dalam perusahaan terdapat dua kepentingan yang berbeda yaitu kepentingan untuk mengoptimalkan profit bagi pemilik perusahaan (*principle*) dan kepentingan untuk mendapatkan imbalan yang besar bagi manajer (*agent*).

Dari penjelasan mengenai kepemilikan manajerial diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa stuktur kepemilikan saham suatu entitas akan mempengaruhi sikap manajemen dalam menentukan apakah akan melakukan tindakan penghindaran pajak ataupun tidak. Kepemilikan saham oleh dewan direksi disebut dapat menurunkan tingkat agresivitas pajak dikarenakan keputusan yang diambil akan berpengaruh terhadap entitas yang dimilikinya. Kepemilikan manajerial dipandang dapat menyatukan tujuan antara pemegang saham dan entitas sehingga dapat mengurangi perilaku manajemen dalam mementingkan diri sendiri (Charisma & Dwimulyani, 2019).

Kepemilikan yang dimiliki oleh manajerial yang berguna untuk meningkatkan kinerja karena dengan begitu manajemen memahami tanggung jawab untuk memenuhi keinginan dari pemegang saham yang dengan mengurangi resiko penghindaran pajak.

Untuk menghitung kepemilikan manajerial diukur dari persentase jumlah saham yang dimiliki oleh direksi dan anggota dewan dari total saham yang beredar.

$$MO = \frac{\text{Jumlah saham manajemen}}{\text{Jumlah saham beredar}} \times 100\%$$

Hubungan Kepemilikan manajerial Dengan *Tax Avoidance*

Dalam prakteknya *tax avoidance* dapat diminimalisir dengan adanya pengawasan melalui mekanisme kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen.

Dinyatakan oleh (Nurhaminah, Anugerah, & Ratnawati, 2018) bahwa ketika kepemilikan manajerial rendah, maka insentif terhadap kemungkinan perilaku oportunistik manajer akan meningkat. Dengan demikian diasumsikan ketika kepemilikan manajerial tinggi maka akan mengurangi perilaku oportunistik manajer.

Hubungan *Good Corporate Governance* (GCG) Dengan *Tax Avoidance*

Teori keagenan yang terjadi dalam perusahaan karena adanya benturan kepentingan antara pemegang saham dan manajemen sehingga memaksa manajemen melakukan praktik *tax avoidance* agar kualitas dan kinerja manajemen terlihat baik sehingga kepentingan investor bisa tercapai. Hal ini dapat mempengaruhi keputusan calon investor/ investor terhadap perusahaan.

Pelaksanaan *good corporate governance* yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, akan membuat investor memberikan respon positif terhadap kinerja perusahaan, bahwa dana yang diinvestasikan dalam perusahaan yang bersangkutan akan dikelola dengan baik dan kepentingan investor publik akan aman. Secara teoritis, jika praktik *good corporate governance* (GCG) berjalan dengan efektif dan efisien maka dapat mengurangi risiko yang memungkinkan dilakukan dewan dengan keputusan yang menguntungkan diri sendiri. Serta menghambat perusahaan melakukan praktik kecurangan seperti *tax avoidance*. (Nofrivul, Subroto, Moeljadi, & Djumahir, 2017)

Teori Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) Dalam Islam

Secara umum negara-negara muslim tidak dapat menjalankan fungsi pajak secara efisien. Hal ini menimbulkan basis pajak yang sempit sehingga mengakibatkan laju pajak yang tinggi. Hal ini yang menimbulkan penghindaran pajak dan uang gelap, pelampiasan utamanya adalah belanja yang melewati batas. (Aziz, 2018)

Menurut Ibnu Taimiyyah, basis pajak, laju pajak, penghindaran pajak, dan uang gelap adalah bagian dari sebuah lingkaran setan. Makin besar keinginan untuk menghindarnya dan makin besar pula volume uang gelap. Lingkaran setan ini saja akan menimbulkan penurunan dalam investasi produktif dan mengurangi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menimbulkan penyandaran yang lebih besar pada perpajakan regresif tidak langsung. Kini sudah menjadi pengetahuan umum bahwa penghindaran pajak oleh mereka yang mampu membayar ternyata sangat besar, padahal jumlah mereka itu sebenarnya sedikit, sementara orang miskin amat banyak. (Aziz, 2018)

Oleh karena itu usaha untuk menghindari pajak dalam masyarakat muslim bukan saja suatu kejahatan kriminal, tetapi juga suatu pelanggaran moral yang akan diberi sanksi kelak dihari kiamat. Lebih-lebih lagi, kalau perilaku pembayaran pajak ini sampai mengurangi kemampuan finansial pemerintah untuk melaksanakan perannya secara efektif, maka ia telah menggagalkan realisasi *maqashid*.

Dengan demikian jelaslah bahwa *tax avoidance* (penghindaran pajak) yang merupakan lingkaran setan dilarang dalam Islam. Hal ini diperkuat oleh pendapat Ibnu Taymiah yang menyatakan penghindaran pajak dilarang berdasarkan pertimbangan bahwa tidak membayar pajak oleh mereka yang berkewajiban akan mengakibatkan beban yang lebih besar bagi kelompok lain.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan alat analisis *Statistical Package for Social Science* (SPSS) versi 22 yang berfungsi untuk menganalisis data dan melakukan perhitungan statistik dengan basis windows.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teknik pengolahan data menggunakan SPSS ini memerlukan beberapa tahap untuk menilai fit model dari suatu model penelitian. Tahap-tahap tersebut sebagai berikut:

Statistik Deskriptif

Deskriptif Umum

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan tentang statistik data seperti min, max, sum, standar deviasi, variance, range, dan lain-lain dan untuk mengukur distribusi data skewness dan kurtosis. (Priyatno, 2017)

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan terhadap 70 populasi perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Indeks 70 (JII70). Dari 70 perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Indeks 70 (JII70) didapatkan 17 perusahaan yang memenuhi kriteria dan 53 perusahaan yang tidak memenuhi kriteria atau tereliminasi. Penelitian ini menggunakan data panel (*panel pooled data*) yang merupakan gabungan dari *crosssection* dan *time series*. Data panel ini bersumber dari data laporan keuangan perusahaan, yang mana

dari 17 perusahaan yang memenuhi kriteria tersebut di observasi dalam periode waktu yang sama, yaitu selama tahun 2018 sampai dengan 2022. Total observasi yang dilakukan adalah 17 perusahaan dikalikan 5 tahun, maka didapat observasi sebanyak 85 observasi.

Deskriptif statistik

Statistik deskriptif dimaksudkan untuk menganalisis data berdasarkan hasil yang diperoleh dari masing-masing indikator pengukur variabel. Analisis statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TA	56	.060317	.328222	.20891669	.053359842
GCG	56	4.320000	8.130000	6.70625000	.996877967
MO	56	.000002	.768550	.08107261	.167052049
Valid N (listwise)	56				

Keterangan:

TA = *Tax Avoidance*/ penghindaran pajak

MO = *Managerial Ownership*/ kepemilikan manajerial

GCG = *Good Corporate Governance*/ tata kelola perusahaan

Berdasarkan tabel dijelaskan hasil statistik deskriptif untuk masing-masing variabel. Dapat diketahui bahwa untuk variabel terikat *Tax avoidance* (TA) yang diukur dengan ETR, memiliki nilai kisaran 0,0603 sampai dengan 0,2089 dengan nilai rata-rata 0,2089 dan standar deviasinya 0,064. Maksudnya selama tahun 2018 sampai dengan 2022, perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic indeks 70 yang dijadikan sampel melakukan pembayaran pajak minimal sebesar 6,03% dari penghasilan kena pajak dan maksimal 20,8% dari penghasilan kena pajak. Rata-rata pajak yang dibayarkan sebesar 20,89% dari penghasilan kena pajak. Semakin rendah nilai ETR, maka mengindikasikan terjadinya peningkatan *tax avoidance* dan apabila semakin tinggi nilai ETR, maka mengindikasikan terjadinya penurunan *tax avoidance*.

Nilai variabel *managerial ownership*/ kepemilikan manajerial memiliki nilai kisaran antara 0,00002 sampai dengan 0,7685 dengan nilai rata-rata 0,0810 dan standar deviasinya 0,1670. Dari nilai rata-rata 0,0810 diketahui bahwa rata-rata perusahaan yang terdaftar pada (JII70) di Indonesia memiliki persentase saham yang dimiliki oleh direktur dan komisaris perusahaan sebesar 81% dari total saham perusahaan. Hal ini menandakan bahwa persentase kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan di Indonesia tergolong tinggi, khususnya pada perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic indeks 70 (JII70) periode tahun 2018-2022.

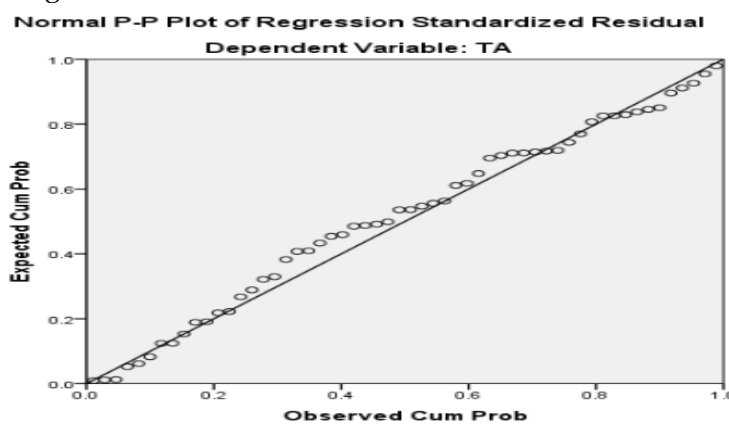
Untuk nilai *corporate governance*, rata-rata perusahaan memiliki nilai indeks rata-rata 6,7062 dengan nilai maksimal 8,130 dan nilai minimum 4,320. Dengan nilai rata-rata sebesar 6,70 tersebut menggambarkan bahwa perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic indeks 70 (JII70) yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia sudah menerapkan *corporate governance* dengan kualitas baik atau berada pada level terpercaya. Nilai 8,13 mengindikasikan ada beberapa perusahaan yang menerapkan *corporate governance* dengan sangat baik dan nilai 4,32 mengindikasikan masih adanya perusahaan yang terdaftar pada indeks syari'ah yang terdaftar di BEI yang belum menerapkan menjalankan *corporate governance* secara serius.

Uji asumsi klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk melihat apakah data penelitian dapat dianalisis dengan menggunakan persamaan regresi linier berganda. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang lolos dari uji asumsi klasik tersebut. (Priyatno, Panduan Praktis Olah Data Menggunakan SPSS, 2017)

Uji normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk memastikan variabel pengganggu atau residual di dalam regresi, terdistribusi normal. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi residual normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas yang dilakukan menggunakan analisis grafik *normal probability* dan uji normalitas *Kolmogorov Smirnov*. Sebagai dasar pengambilan keputusan, jika titik-titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal, maka nilai residual tersebut telah normal.



Gambar 1. Grafik *Normal Probability* dan Uji Normalitas *Kolmogorov Smirnov*

Dari gambar dapat dilihat bahwa *plotting* data residual mengikuti garis lurus diagonal, *plotting* data atau titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan mendekati garis diagonal, serta *plotting* data juga mengikuti arah garis diagonal. Berdasarkan analisis grafik dapat disimpulkan bahwa residual pada model regresi yang digunakan berdistribusi normal. Untuk memperkuat hasil dari analisis grafik diatas, selanjutnya dilakukan juga analisis statistik dengan menggunakan uji statistik *Kolmogorov Smirnov*. Berikut tabel hasil uji *Kolmogorov Smirnov*.

Tabel 3. Hasil Uji *Kolmogorov Smirnov*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			56
Normal Parameters ^{a,b}		Mean	.0127873
		Std. Deviation	.04563047
Most Extreme Differences	Extreme	Absolute	.101
		Positive	.047
		Negative	-.101
Test Statistic			.101
Asymp. Sig. (2-tailed)			.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat nilai *Kolmogorov Smirnov* di atas bisa diambil kesimpulan bahwa, data memiliki distribusi normal karena nilai *Kolmogorov Smirnov* memiliki tingkat signifikan sebesar 0,200. Pada uji ini data terdistribusi normal jika nilai probabilitas $\geq 0,05$. Nilai probabilitas 0,200 lebih besar dari 0,05, ini artinya data terdistribusi normal.

Uji Multikolonieritas

Uji multikolinieritas adalah keadaan dimana pada model regresi ditemukan adanya kolerasi yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak kolerasi di antara variabel independennya. Pengujian multikolonieritas pada model regresi dilakukan dengan cara melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Untuk mengetahui suatu model regresi bebas dari multikolinieritas, yaitu nilai VIF kurang dari 10 dan mempunyai angka *tolerance* lebih dari 0,1 (ghozali, 2018). Berikut tabel *coefficient correlation*.

Tabel 4. Coefficient Correlation Coefficients^a

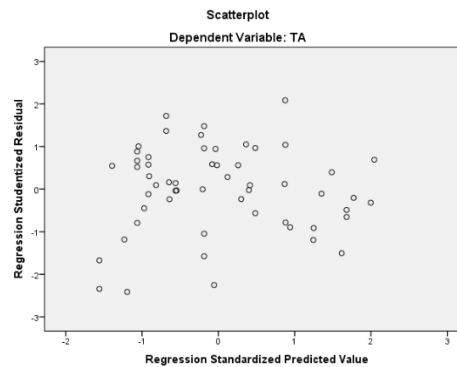
Model		Unstandardized Coefficients		Standar dized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.377	.042		8.885	.000		
	GCG	-.026	.006	-.487	-4.142	.000	.989	1.011
	MO	.080	.038	.250	2.124	.038	.989	1.011

a. Dependent Variable: TA

Berdasarkan tabel ditemukan hasil perhitungan nilai *tolerance* yang lebih dari 0,10 artinya tidak ada kolerasi antar variabel independen. Dari hasil perhitungan nilai *variance inflation factor* (VIF) nilai VIF kurang dari 10. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa tidak adanya kolerasi antara masing-masing variabel independent dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (ghozali, 2018). Pengujian heteroskedastisitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan grafik *scatterplot*. Berikut grafik *scatterplot*.



Gambar 2. Grafik Scatterplot

Dari terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi *tax avoidance* berdasarkan masukan dari variabel independen *corporate governance* dan *managerial ownership*.

Hasil Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen berupa *corporate governance* dan *managerial ownership* terhadap *tax avoidance* dengan tingkat signifikansi yang masih belum bisa di toleransi ditetapkan 0,05 ($\alpha = 5\%$). Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan *goodness of fit test* adalah sejumlah pengujian statistik yang digunakan untuk mengetahui akurasi model dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai prediktor yaitu alat untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen. Secara statistik, *goodness of fit test* ini dapat diukur dari nilai koefisien derteminasi, nilai statistik F dan nilai statistik t. Perhitungan statistik tersebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H_0 ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H_0 di terima (ghozali, 2018). Berikut tabel estimasi *R-square* dengan menggunakan SPSS 22.

Tabel 5. Estimasi R-Square Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.377	.042		8.885	.000
1GCG	-.026	.006	-.487	-4.142	.000
MO	.080	.038	.250	2.124	.038

a. Dependent Variable: TA

Untuk melihat besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat dari nilai beta *unstandardized*, sedangkan untuk melihat dominasi variabel independen terhadap variabel dependen tercermin pada beta standardizet. Berdasarkan tabel pengujian regresi linier maka diperoleh persamaan regresi yaitu:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$(TA) = 0,377 + 0,080 MO + (-0,026) GCG$$

Keterangan:

Y = *Tax Avoidance*

a = Konstanta

X1 = kepemilikan manajerial

X2 = *corporate governance*

B1-b2 = Koefisien regresi

e = Kesalahan (*error*)

Berdasarkan persamaan tersebut menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manjerial (X1) mempunyai pengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic indeks 70 (JII70). Sedangkan tanda negatif pada *good corporate governance* (X2) menunjukkan bahwa variabel tersebut mempunyai pengaruh negatif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic indeks 70 (JII70). Adapun dari hasil model persamaan regresi linier berganda dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Konstanta (a)
Nilai konstanta (a) sebesar 0,377 artinya jika variabel bebas kepemilikan manajerial dan *corporate governance* bernilai 0, maka nilai CETR sebesar 0,377 atau 37,7%.
- 2) Koefisien regresi
 - a) B1: 0,080 = nilai koefisien variabel kepemilikan manajerial sebesar 0,080, nilai ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% kepemilikan manajerial, maka nilai CETR akan naik sebesar 0,080 atau 8,0%.
 - b) B2: (-0,026) = nilai koefisien variabel *good corporate governance* sebesar (-0,026), nilai ini menunjukkan bahwa setiap variabel *good corporate governance* mengalami peningkatan 1%, maka nilai CETR akan turun atau berkurang sebesar 0,032.

Signifikansi Parameter Individual (Uji T)

Uji T (uji koefisien regresi secara parsial) digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial kepemilikan manajerial dan *corporate governance* berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap *tax avoidance*. Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05 (Priyatno, Panduan Praktis Olah Data Menggunakan SPSS, 2017). Hasil uji t dapat dilihat pada tabel yang ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Uji t

		Coefficients ^a		t	Sig.
Model		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	.377	.042		8.885
	GCG	-.026	.006	-.487	4.142
	MO	.080	.038	.250	2.124

a. Dependent Variable: TA

Berdasarkan tabel 6 terlihat hasil pengujian signifikansi variabel bebas secara parsial sebagaimana pada pembahasan sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan manajerial

Variabel *managerial ownership* (MO) berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini dapat dilihat probabilitas signifikansi untuk *managerial ownership* (MO) $0,038 < 0,05$. Jika dilihat dari nilai t hitung diperoleh angka 2,124 sedangkan nilai t tabel yaitu sebesar 1,672522. Hasil ini menyatakan bahwa t hitung $>$ t tabel ($2,124 > 1,672522$), maka H_0 diterima dan H_0 ditolak, artinya ada pengaruh positif antara *managerial ownership* (MO) terhadap *tax avoidance* (TA).

- 2) *Good corporate governance* (GCG)

Variabel *good corporate governance* (GCG) dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai t hitung sebesar 4,142 dan nilai t tabel sebesar 1,672522. Hasil ini menyatakan bahwa t hitung $>$ t tabel ($4,142 > 1,672522$), dengan nilai signifikan $0,00 < 0,05$. Dari nilai beta diketahui *good*

corporate governance (GCG) bertanda negatif artinya *good corporate governance* (GCG) berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa H_A diterima dan H_0 ditolak. Artinya semakin tinggi atau bertambah nilai *good corporate governance* (GCG) belum mampu menekan aktivitas *tax avoidance* (penghindaran pajak), atau belum mampu meningkatkan nilai CETR, karena semakin rendah nilai CETR di indikasi semakin tingginya praktik penghindaran pajak. Dari sini dapat disimpulkan bahwa variabel *tax avoidance* dipengaruhi oleh *good corporate governance* (GCG).

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F berfungsi untuk menguji signifikansi pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0.05. (Priyatno, Panduan Praktis Olah Data Menggunakan SPSS, 2017) Uji statistik F dapat dilihat tabel 7 berikut ini:

Tabel 7. Uji statistik F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.043	2	.021	10.026	.000 ^b
	Residual	.114	53	.002		
	Total	.157	55			

a. Dependent Variable: TA

b. Predictors: (Constant), MO, GCG

Berdasarkan tabel 7 terlihat bahwa diperoleh nilai signifikan $0,000 < 0,05$ yang menunjukkan secara silmutan *Good corporate governance* (GCG) dan *managerial ownership* (MO) secara bersama-sama atau silmutan berpengaruh terhadap *tax avoidance* (TA).

Uji Derteminasi

Uji Derteminasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen, maka digunakanlah koefisien determinasi. Dalam penelitian ini, nilai koefisien determinasi yang dipakai adalah nialai *R square* (R^2) atau kuadrat dari R, yaitu menunjukkan koefisien determinasi. Angka ini akan diubah ke bentuk persen, artinya persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut tabel estimasi *R-square* dengan menggunakan SPSS 22.

Tabel 8. Estimasi *R-Square*
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.524 ^a	.274	.247	.046299872

a. Predictors: (Constant), MO, GCG

b. Dependent Variable: TA

Dari tabel terlihat bahwa nilai *R-Square* yang diperoleh adalah 0,462 atau 46,2% Nilai ini memiliki arti, variasi perubahan variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel dependen sebesar 46,2%. Sisanya 53,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam model ini.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial (*managerial ownership*/MO) berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai signifikansi $0,038 < 0,05$ dan t hitung sebesar $2,124 > t$ tabel $1,672522$. Dengan demikian, hipotesis alternatif diterima dan hipotesis nol ditolak, menunjukkan bahwa semakin besar kepemilikan manajerial, semakin tinggi kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Selanjutnya, *good corporate governance* (GCG) terbukti berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sebagaimana

ditunjukkan oleh nilai signifikansi $0,00 < 0,05$ dan t hitung sebesar $4,142 > t$ tabel $1,672522$, meskipun peningkatan GCG belum mampu menekan praktik penghindaran pajak secara signifikan karena CETR yang rendah mengindikasikan praktik tax avoidance tetap tinggi. Uji simultan (Uji F) juga menunjukkan bahwa MO dan GCG secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Secara deskriptif, rata-rata CETR perusahaan sebesar 20,89%, lebih rendah dari tarif pajak yang berlaku yaitu 22%, mengindikasikan adanya kecenderungan penghindaran pajak. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan seperti cakupan variabel independen yang sempit (hanya MO dan GCG), periode pengamatan yang terbatas pada tahun 2019–2022, serta hanya mencakup perusahaan dalam indeks JII70. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel-variabel independen lain untuk meningkatkan penjelasan terhadap tax avoidance, memperluas sampel penelitian, serta memperpanjang periode observasi. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini memberikan masukan agar lebih memperhatikan praktik tax avoidance melalui penguatan struktur kepemilikan dan tata kelola perusahaan yang sesuai prinsip syariah. Sementara itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi variabel lain yang mungkin memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak serta memperluas cakupan perusahaan dan periode penelitian untuk memperoleh hasil yang lebih generalisabel dan mendalam.

Referensi :

- Charisma, R. B., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Kualitas audit Sebagai Variabel Moderating. *Prosiding Seminar Nasional* , 2.32.2-2.32.3.
- Moeliono. (2020). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Dan Bisnis*, 5 (1), 109.
- Nugraha, G. A., & Octisari, K. S. (2022). Analisis Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan). *Call for Paper and National Conference*, 405.
- Nurhaminah, Anugerah, R., & Ratnawati, V. (2018). Pengaruh Earning Management dan Tax Avoidance Terhadap Nilai perusahaan dengan Struktur Kepemilikan sebagai Moderating variabel pada Perusahaan Kelompok LQ 45 di BEI Tahun 2013-2016. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Vol 13, No. 2*, 60.
- Prasetyo, I., & Pramuka, B. A. (2018). Pengaruh Kepemilikan Institusioanal, Kepemilikan Manajerial Dan Proporsi Dewan Komisarisn Independen Terhadap Tax Avoidance. *Jurnak Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA) Volume 20 Nomor 02*.
- Prastiyanti, S., & Mahardika, A. S. (2022). Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, firm Size, dan Profitabilitas Terhadap Tindakan Tax Aviodance. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis dan Akuntasi* 4(4), 516.
- Prihantono, & Fachrurazi. (2019). *Good Corporate Governance Bank Syariah*. Pontianak: IAIN Pontianak Press.
- Puspita, D., & Febrianti, M. (2017). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Vol. 19, No. 1*, 39.
- Sudarno, Renaldo, N., & Dkk. (2018). *Teori Penelitian Keuangan*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Suharna, A., & Swandari, F. (2018). Pengaruh Corporate Governance Perception Index Terhadap Kinerja Perusahaan dalam Masa Krisis Ekonomi Global. *Jurnal Wawasan Manajemen, vol. 1*, 134.
- Violeta, C. A., & Serly, V. (2020). Pengaruh Manajemen Laba dahn Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2014-2018). *Wahana Riset Akuntansi Vol 8, No 1*, 4.